

Policy Paper Series: Mengkaji Program Makan Bergizi Gratis

Pentingnya Penguatan Tata Kelola, Regulasi, dan Monitoring Evaluasi pada Program Makan Bergizi Gratis

Pendahuluan	1
Program MBG Dimulai: Bagaimana Kesiapannya?	2
1. Kualitas Perencanaan, Monitoring serta Evaluasi Program.....	6
2. Potensi Inefisiensi Anggaran Program MBG	8
3. Pemenuhan Gizi dan Keamanan Pangan dalam Program MBG	9
Rekomendasi	11
Penutup	16

Pendahuluan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi bergulir serentak pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi dengan target sasaran 600 ribu penerima manfaat.¹ Pada tahap awal ini, pemerintah memperluas cakupan penerima manfaat dari yang semula hanya menyasar siswa sekolah dasar dan menengah, menjadi termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.² Rencananya, pada Juli mendatang, program MBG dapat menyasar 17,5 juta penerima manfaat di 38 provinsi.³

Berjalannya program andalan Prabowo–Gibran ini memunculkan perbincangan di masyarakat, salah satunya soal anggaran. Pemerintah pusat awalnya menetapkan anggaran program MBG sebesar Rp 71 triliun. Akan tetapi, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memprediksi besaran anggaran tersebut hanya mencukupi kebutuhan pelaksanaan MBG hingga Juni 2025.⁴ Pemerintah memerlukan tambahan 100 triliun agar program MBG dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.⁵

Berbagai wacana atau ide untuk menambal kekurangan anggaran MBG ini dimunculkan ke publik oleh beberapa pemangku kebijakan. Namun belakangan,

pemerintah mengambil langkah untuk memangkas belanja kementerian/lembaga serta dana transfer pusat ke daerah untuk tahun anggaran 2025. Langkah yang disebut pemerintah sebagai efisiensi ini mulai berlaku sejak diterbitkannya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. Melalui Inpres ini, pemerintah berniat mengefisienkan anggaran hingga Rp 306 triliun. Hasil dari efisiensi anggaran ini, menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, salah satunya digunakan untuk menambah anggaran MBG.⁶

Dinamika berjalannya program MBG tidak hanya tentang anggaran saja, namun juga terdapat aspek mengenai tata kelola, keterlibatan kelompok masyarakat dalam pemantauan, hingga kandungan nutrisi dalam menu. Untuk itu, *Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives* (CISDI) menyusun seri kedua Kajian Makan Bergizi Gratis yang menyoroti sejumlah isu tata kelola, termasuk ketersediaan payung regulasi dan petunjuk teknis, hingga struktur koordinasi dan tata kelola pemerintah.

Kajian ini disusun menggunakan metode kualitatif deskriptif, mengkombinasikan pemantauan media, tinjauan pustaka, dan diskusi kelompok terpumpun bersama panel ahli. Adapun proses pemantauan media dimulai sejak 6 – 17 Januari 2025 yang difokuskan pada observasi menu dan perkembangan operasionalisasi program MBG.

Program MBG Dimulai: Bagaimana Kesiapannya?

Pada seri pertama Kajian Makan Bergizi Gratis yang dipublikasikan Agustus 2024, CISDI menyoroti bagaimana kompleksitas dan besarnya anggaran untuk program ini memerlukan kerangka regulasi dan tata kelola yang baik. Hal ini diperlukan agar proses perencanaan hingga implementasi MBG dapat berjalan secara efektif dan akuntabel. Ketidakjelasan target sasaran program, keterbatasan anggaran, serta belum jelasnya struktur kelembagaan dan koordinasi lintas sektor menjadi tiga tantangan utama yang muncul pada fase-fase awal uji coba program MBG pada akhir 2024.

Meski sudah melalui serangkaian uji coba, dinamika keberjalanan program MBG ini salah satunya diakibatkan belum memadainya kerangka regulasi dan tata kelola MBG. Dalam diskusi bersama panel ahli, terungkap bahwa satu-satunya regulasi yang tersedia adalah Surat Keputusan Deputy Bidang Penyaluran BGN No. 2 Tahun 2024, yang memuat petunjuk teknis operasional MBG. Penggunaan surat keputusan ke deputian lembaga tentu tidak memiliki kekuatan mengikat dan lebih bersifat operasional. Padahal, program MBG sangat membutuhkan regulasi yang tingkatannya lebih tinggi guna mengatur aspek tata kelola dan kerja-kerja lintas sektor terkait MBG.

Sayangnya, dokumen tersebut juga tidak diunggah di kanal resmi BGN. Tim peneliti CISDI menemukan salinan petunjuk teknis tersebut lewat situs berbagi dokumen scribd.com. Setelah telaah dokumen dilakukan, juknis tersebut juga belum mengatur secara detil operasional MBG seperti standar kebersihan, keamanan pangan, pengumpulan bahan, pengemasan, suplai, hingga penyaluran makanan.

Kita bisa membandingkan kerangka regulasi ini dengan program Percepatan Penurunan Stunting yang sudah berjalan sejak 2018. Program ini memiliki payung regulasi setingkat peraturan presiden, yang implementasinya juga didukung oleh peraturan setingkat menteri, serta petunjuk teknis sebagai acuan bagi pemerintah daerah menyusun kebijakan dan implementasi program. Bahkan, program lain seperti Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) diatur pelaksanaannya melalui Permendagri 18/2011 yang turut mengkoordinasikan peran lintas sektor.

Minimnya regulasi program MBG mengakibatkan lemahnya struktur tata kelola serta terbatasnya koordinasi juga peran dan tanggung jawab kementerian/lembaga (K/L) terkait. Peran K/L lain di luar BGN masih belum diatur tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya. Alur koordinasi dan ke mana K/L harus berkoordinasi juga luput dari pengaturan. Sebagai contoh, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) baru dilibatkan secara resmi setelah Nota Kesepahaman (*MoU*) bersama BGN disepakati pada 23 Januari 2025.⁷ Sebelum itu, tidak ada kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan keamanan pangan, mengingat BGN secara kelembagaan tidak memiliki fungsi tersebut sebagaimana diatur dalam Perpres 83/2024.⁸

Sebagaimana isu keamanan pangan, BGN juga memiliki kewenangan terbatas untuk menjalankan fungsi promotif–preventif gizi. Di sisi lain, Direktorat Gizi pada tahun 2025 resmi dihapuskan dari struktur organisasi Kemenkes.⁹ Sebagai catatan, Direktorat Gizi sebelumnya memiliki kewenangan dan kapasitas teknokratik untuk melaksanakan intervensi promotif–preventif gizi. Terkait perubahan ini, belum terlihat upaya pemerintah pusat mengatur pembagian peran serta menyusun alur koordinasi teknis antara BGN dan Kementerian Kesehatan untuk melengkapi program MBG dengan intervensi promotif–preventif gizi.

Keterbatasan kewenangan dan kapasitas kelembagaan BGN membuat sentralisasi tata kelola MBG pada BGN kurang relevan. Kecenderungan sentralisasi program MBG pada BGN terjadi sejak pengembangan program dan percontohan dilaksanakan (lihat [lampiran 1](#)). Awalnya, program MBG sepenuhnya akan digerakkan oleh BGN melalui operasionalisasi SPPG. Namun pada 31 Desember 2024, BGN mulai membuka kemitraan untuk MBG atau 7 hari menjelang peluncuran program tersebut.⁹ Pelibatan BPOM hampir 3 minggu setelah program

berjalan, serta belum diaturnya regulasi mengenai peran dan koordinasi lintas sektor juga mengindikasikan minimnya keterlibatan lintas K/L dalam kerangka institusional MBG.

Sentralisasi tata kelola MBG juga berdampak pada kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan program MBG. Berbagai kendala di lapangan menunjukkan pemerintah daerah belum sepenuhnya siap dalam melaksanakan MBG. Belum tersedianya juknis operasional MBG, kurangnya sosialisasi teknis pelaksanaan, hingga minimnya pelibatan pemerintah daerah dalam uji coba dan perencanaan MBG menjadi faktor ketidaksiapan. Informasi yang dikumpulkan oleh Institut Harkat Negeri juga menyatakan bahwa masih ada sejumlah daerah yang melaporkan mengenai ketiadaan petunjuk teknis untuk implementasi MBG di daerah.¹⁰ Padahal, BGN memiliki fungsi koordinasi secara horizontal maupun vertikal yang semestinya dioptimalkan untuk menempatkan pemerintah daerah sebagai mitra strategis di lapangan.

Sementara itu, pelibatan TNI dalam program MBG yang cukup signifikan membawa tantangan lain. Dalam laporan Kontan (2025)¹¹, disebutkan TNI libatkan 351 Komando Distrik Militer (Kodim), 14 Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal), dan 41 Pangkalan Utama Udara (Lanud) untuk program MBG. Pro-kontra pelibatan aparat TNI tidak hanya terbatas pada relasi militer dan sipil, melainkan juga dari aspek kompetensi teknis mengenai gizi dan pendekatan militer yang lebih bersifat respons kegawatdaruratan. Selain itu, karakteristik militer yang bersifat rantai komando juga dikhawatirkan mempengaruhi kualitas dan menyebabkan bias dalam monitoring dan evaluasi program MBG di lapangan yang dalam konteks saat ini diperlukan sebagai basis data dalam menyempurnakan program MBG.

Belum tersedianya regulasi yang mengatur kemitraan MBG yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Kemitraan yang sudah dijalankan, termasuk dengan aktor bisnis, turut mencakup strategi distribusi, penyelenggaraan dapur sentral (SPPG), hingga penyediaan produk pangan dan sumber protein.^{12,13} Namun, kami belum melihat adanya upaya pemerintah meregulasi hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mendisrupsi lingkungan pangan sehat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 200-202 PP 28/2024 tentang Kesehatan. Praktik seperti penyediaan produk hingga promosi pangan ultra-proses tinggi GGL di lingkungan sekolah terjadi di beberapa tempat (sebagaimana terlihat di *Lampiran 2*).

Box 1. Komparasi Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis

Kami membandingkan tata kelola program *free school meals* antara India, Brazil, dan Jepang (lihat [lampiran 1](#)). Ketiga negara ini dikenal sebagai negara percontohan program *free school meals* yang juga dijadikan rujukan pemerintah

untuk mengembangkan program MBG. Setidaknya, terdapat beberapa pembelajaran dari tiga studi kasus tersebut.

1. **Semua negara memiliki infrastruktur regulasi setingkat undang-undang untuk menjalankan program MBG.** Dalam studi kasus Brazil, aturan dalam konstitusi diterjemahkan dalam Undang-Undang ([Law No 11.947/2009](#)) khusus untuk program *free school meals*. UU ini mengatur kewenangan semua pemangku kepentingan di berbagai level pemerintah, juga mengatur relasi negara dan swasta. Melalui UU ini, Brazil turut mengatur *conflict of interest* dan kewajiban pemerintah sub-nasional mengalokasikan pembiayaan untuk belanja bahan pangan segar melalui skenario *budget tagging*.¹⁶
2. **Signifikansi peran pemerintah sub-nasional dalam semua siklus program makan anak sekolah.** Brazil, India, dan Jepang memposisikan pemerintah sub-nasional sebagai aktor utama dalam perencanaan, implementasi, dan monitoring-evaluasi program. Pada studi kasus India, proses monitoring dilakukan berjenjang melalui komite lintas sektor mulai dari tingkat kota/kabupaten, kecamatan, hingga sekolah.¹⁴ Komite ini terdiri dari dua perwakilan organisasi masyarakat sipil, ahli gizi, penyuluh kesehatan, sekolah dan orang tua siswa.¹⁴
3. **Model desentralistik menjadi pendekatan yang digunakan ketiga negara.** Model desentralistik memungkinkan proses rantai nilai menjadi lebih singkat, karena proses pengolahan makanan langsung diserahkan kepada sekolah. Dalam studi kasus Jepang, program *free school meals* terintegrasi dengan proses belajar dan kurikulum di sekolah. Dengan demikian, sekolah dan siswa berperan krusial dalam pengimplementasian program *free school meals*.¹⁵
4. **Keterlibatan mitra pembangunan global dalam pengembangan, implementasi, dan monitoring evaluasi program.** Pada studi kasus India dan Brazil, WFP dan FAO terlibat langsung untuk memberikan asistensi teknis untuk meningkatkan kapasitas negara dalam perencanaan, implementasi, dan monitoring program. Hanya Jepang yang menjalankan program ini secara penuh bermodalkan sumber daya domestik.

Dampak Ketidaksiapan Kerangka Regulasi dan Tata Kelola Terhadap Implementasi Program MBG

Pada bagian ini, kami telah menganalisis bagaimana implikasi dari ketidaksiapan kerangka regulasi dan tata kelola terhadap efektivitas program MBG. Berdasarkan hasil pemantauan media dan diskusi bersama panel ahli, kami merangkum setidaknya tiga implikasi utama dari lemahnya kerangka regulasi serta tata kelola program MBG, yaitu:

1. Kualitas Perencanaan, Monitoring serta Evaluasi Program

Hasil diskusi kami bersama panel ahli menunjukkan bahwa proses penyusunan kebijakan/program berbasis bukti dalam perencanaan MBG belum dilakukan secara menyeluruh. Ini dicirikan dengan (1) tidak terbukanya akses terhadap studi mengenai penilaian dampak awal dan analisis biaya manfaat (*cost-benefit analysis*) dari titik uji coba MBG sepanjang 2024; (2) tidak transparannya informasi mengenai metode penghitungan satuan harga rata-rata dan kelompok sasaran dari program MBG; serta (3) minimnya pelibatan masyarakat sipil, termasuk ahli, akademisi dan masyarakat lokal dalam semua siklus program MBG. Selain itu, para ahli menilai penggunaan uang pribadi Presiden Prabowo untuk uji coba program MBG membuat penyusunan kebijakan berbasis bukti menjadi sulit untuk dipertanggungjawabkan.¹⁷

Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan bukti dari program-program lain yang telah diterapkan secara global. Tinjauan sistematis World Bank menunjukkan program *free school meals* secara global masih memiliki basis bukti terbatas terkait dampaknya terhadap target capaian indikator intervensi gizi dan perbaikan pola makan (Lihat tabel 1).¹⁸ Studi yang sama menunjukkan bukti yang relatif kuat terkait dampak program pada peningkatan kehadiran siswa ke sekolah dan keuntungan komersial sektor pertanian.

Tabel 1. Tinjauan Sistematis World Bank untuk program Free School Meals ([World Bank, 2024](#))

Indikator Iuaran	Basis Bukti
Pertanian	- Bukti kausalitas sangat terbatas mengenai dampak dari penyelenggaraan program terhadap produksi pertanian lokal dan pendapatan petani di negara-negara berpenghasilan rendah. - Bukti yang relatif kuat mengenai keuntungan komersial dari sektor pertanian di negara-negara berpenghasilan menengah dan tinggi.
Pendidikan	- Bukti yang relatif kuat tentang dampak pada partisipasi sekolah, khususnya kehadiran siswa. - Bukti yang terbatas, namun mulai muncul hasil mengenai pembelajaran, khususnya di antara sub-kelompok tertentu seperti siswa miskin dan anak perempuan.
Kesehatan dan Gizi	- Bukti yang terbatas dan beragam tentang dampak pada hasil gizi, seperti skor tinggi Badan menurut Umur. - Bukti yang sangat terbatas mengenai aspek gizi lainnya, seperti meningkatkan kualitas pola makan. - Penelitian yang sedang berkembang mengenai potensi makanan sekolah yang sesuai dengan gizi untuk memoderasi risiko obesitas pada masa kanak-kanak dan penyakit tidak menular yang berhubungan dengan pola makan di masa dewasa.
	Bukti yang muncul mengenai peran makanan sekolah dalam

Perlindungan sosial	membangun sumber daya manusia masyarakat miskin. • Bukti yang terbatas namun menjanjikan tentang peran makanan sekolah sebagai jaring pengaman terhadap guncangan ekonomi
---------------------	--

Sementara itu, mekanisme monitoring dan evaluasi dalam juknis MBG juga masih belum jelas ketentuannya, utamanya untuk melaporkan dan memperbaiki kendala, serta mengukur efektivitas program MBG.¹⁸ Juknis tersebut juga tidak menjelaskan data dan/atau indikator intervensi apa saja yang perlu dipantau di lapangan, baik itu status gizi penerima manfaat, potensi limbah makanan sisa, maupun keamanan dan kebersihan pangan.

Belum jelasnya indikator intervensi dapat berpengaruh terhadap sulitnya menilai keberhasilan program MBG, terutama dampak program terhadap perbaikan status gizi penerima manfaat. Selain itu, bila tidak didukung dengan indikator yang jelas, maka implementasi MBG akan menghasilkan variasi data capaian yang sangat beragam. Akibatnya, akan sulit untuk mendapatkan basis data yang kuat dari pelaksanaan program.

Di luar persoalan perencanaan dan ketersediaan indikator monitoring-evaluasi, target pemerintah untuk program MBG masih terbatas pada peningkatan cakupan penerima manfaat secara signifikan. Dari dokumen yang sama, disebutkan pemerintah berusaha memperluas target cakupan penerima manfaat program MBG secara signifikan dalam kurun waktu satu semester ke depan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Target Penerima Manfaat MBG TA. 2025. Sumber: [BGN \(2024\)](#)

Bulan	Target Penerima Manfaat	Titik SPPG
Januari - Februari 2025	3 Juta	937 titik SPPG
April 2025	6 juta	2000 titik SPPG
Juli 2025	17,5 juta	5000 titik SPPG

Padahal, belum ada studi maupun basis bukti yang menunjukkan urgensi perluasan target kelompok penerima manfaat MBG di Indonesia. Dalam wawancara bersama media, Menteri Koordinator Bidang Pangan [Zulkifli Hasan \(2025\)](#) menyebutkan penerima manfaat MBG ditargetkan akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025. Dari pernyataan tersebut, terlihat program MBG masih memprioritaskan target capaian yang berorientasi pada kuantitas, tanpa mengeksplorasi lebih jauh kualitas dan efektivitas program, termasuk kepada kelompok rentan dan yang paling membutuhkan.

2. Potensi Inefisiensi Anggaran Program MBG

Fokus program MBG pada kuantitas penerima manfaat tanpa mengukur dampak, kualitas, dan efektivitas program berisiko meningkatkan inefisiensi program MBG. Meski sudah dipatok anggaran sebesar Rp 71 triliun, program ini diestimasi masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun guna menjangkau 82,9 juta penerima manfaat MBG hingga akhir 2025.¹⁹

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah pusat telah mengeluarkan Inpres 1/2025 mengenai efisiensi belanja negara untuk menghemat anggaran hingga Rp 306 triliun.²⁰ Kementerian Kesehatan harus melakukan efisiensi sebesar Rp 19 triliun (18%) dari anggaran Rp 105 triliun yang disepakati di tahun 2025. Kementerian lain yang juga terdampak ialah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang harus memangkas anggaran hingga 80% atau sekitar Rp 81 triliun.²¹ Kebijakan ini berpotensi berdampak terhadap program penguatan infrastruktur sanitasi yang merupakan bagian dari intervensi sensitif stunting.

Pada 4 Februari 2025, Kementerian Keuangan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 29 Tahun 2025 mengenai penyesuaian rincian alokasi transfer daerah. Kebijakan ini merupakan turunan dari Inpres 1/2025 yang secara resmi mengatur pemangkasan dana transfer daerah hingga Rp 50 triliun. Efek dari kebijakan ini dirasakan langsung oleh pemerintah daerah. Dalam studi kasus Pemerintah Kota Probolinggo misalnya, pergeseran dan penghematan anggaran untuk program MBG ini berpotensi membuat ruang fiskal pada APBD berkurang hingga Rp 62 miliar.²² Selain itu, 413 pemerintah kabupaten dan 93 pemerintah kota telah mendapatkan arahan dari Kementerian Dalam Negeri untuk berkontribusi terhadap program MBG melalui APBD guna memenuhi target ruang fiskal sebesar Rp 2,3 hingga Rp 2.5 triliun.²³

Tidak hanya melalui APBD, alokasi dana desa sebesar Rp 20 triliun dari anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) juga akan difokuskan untuk mendukung program MBG.²⁴ Alokasi ini berpotensi menghambat program prioritas daerah lainnya, seperti pembangunan infrastruktur dasar, subsidi angkutan massal, hingga jaringan transportasi publik. Ketimpangan pembangunan di tingkat daerah juga harus diantisipasi oleh pemerintah pusat, mengingat bahwa dana transfer pusat memiliki signifikansi untuk mengejar capaian pembangunan daerah yang secara relatif masih tertinggal.

Pergeseran prioritas ini menjadi hal yang sulit dihindari mengingat program MBG merupakan janji kampanye pemerintahan Prabowo-Gibran sejak pemilihan presiden berlangsung. Namun, jika tidak dikerjakan dengan prinsip teknokratis yang baik, program ini berisiko menyebabkan inefisiensi dan tidak tercapainya dampak yang diharapkan.

3. Pemenuhan Gizi dan Keamanan Pangan dalam Program MBG

Pada bagian ini, kami mencoba untuk menganalisis menu Program MBG pada periode implementasi 6–17 Januari 2025. Kami menganalisis menggunakan aplikasi *nutrisurvey* dan mengacu pada ketentuan Angka Kecukupan Gizi¹ (AKG) dalam [Permenkes 28/2019](#). Ketentuan ini juga yang menjadi rujukan [petunjuk teknis penggunaan bantuan pemerintah untuk program MBG](#), di mana estimasi lengkap mengenai kandungan gizi dihitung dan dapat dilihat hasilnya pada [lampiran 2](#).

Dari sampel yang terkumpul, tercatat hanya 5 dari 29 menu (17%) yang memenuhi target 30–35% AKG energi harian. Data tersebut dihitung berdasarkan perhitungan jumlah energi dengan estimasi menu yang disajikan adalah per dua satuan penukar sumber karbohidrat. Padahal, sesuai dengan [petunjuk teknis MBG](#), satu porsi makan siang ditujukan untuk dapat memenuhi kecukupan kalori sebesar 30–35% AKG harian dan kebutuhan protein sebesar 33–36,4% bagi peserta didik di jenjang SD kelas 4–6, SMP, dan SMA sederajat. Apabila konsumsi menu dengan rendah kalori terjadi secara terus-menerus, penurunan performa akademik dapat terjadi karena kurangnya energi untuk beraktivitas.²⁵

Di sisi lain, kandungan protein dari sampel yang terkumpul menunjukkan bahwa 48% menu memiliki kandungan protein berlebih, 34% kurang, dan 17% sesuai dengan target 33–36,4% AKG protein harian (lihat lampiran 2). Apabila makanan dengan protein berlebih diberikan saat penerima manfaat memiliki asupan protein rendah, maka ini akan membantu penerima manfaat memenuhi kebutuhan hariannya. Namun, bila makanan dengan kandungan berlebih diberikan kelompok anak yang asupan proteinnya cukup atau berlebih, maka ini akan memberikan dampak negatif terhadap kesehatan, salah satunya risiko obesitas.^{26,27}

Terlebih, 45% menu MBG yang CISDI analisis masih menambahkan pangan ultra-proses berupa produk susu kemasan berperisa yang tinggi gula. Sebagai catatan, [petunjuk teknis MBG](#) belum memasukkan pembatasan pangan ultra-proses. Ketersediaan produk pangan ultra proses yang mengandung kadar gula, lemak, dan garam berlebih, merupakan salah satu penyebab utama dari tren obesitas, hipertensi, dan penyakit tidak menular lainnya.²⁸

Pangan ultra-proses juga diolah secara industri untuk menyebabkan adiksi melalui rasa yang sangat nikmat (*hyper-palatable*) dan dapat memicu keinginan konsumsi kalori yang lebih tinggi setelahnya.²⁹ Konsumsi pangan

¹ AKG didefinisikan sebagai kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis, untuk hidup sehat.

ultra-proses yang cenderung lebih mudah juga berpotensi menggantikan konsumsi makanan tradisional yang minim pengolahan, dan mengandung lebih banyak nutrisi yang bermanfaat.²⁹

BOX 2. Mengapa pemberian susu kemasan berperisa kurang tepat dalam program MBG?

1. Bukan hanya karena susu yang disajikan merupakan susu bergula dan berperisa, tapi juga mengandung zat inhibitor zat besi.² Apabila zat inhibitor dikonsumsi bersamaan dengan sumber zat besi (contoh bayam, daging merah, ikan, *seafood*, dan lainnya), maka penyerapan zat besi dapat terhambat. Terutama mengingat angka anemia (diakibatkan oleh rendahnya asupan zat besi) pada remaja putri di Indonesia masih tinggi (sekitar 1 dari 3 remaja) dan menjadi masalah kesehatan masyarakat. Zat inhibitor direkomendasikan dikonsumsi sekitar dua jam setelah makan. Namun, di program MBG tidak ada edukasi tentang waktu konsumsi susu tersebut. Hal ini tentu kontradiktif dengan edukasi pada program pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) untuk remaja putri yang dilakukan oleh 4 kementerian (Kesehatan, Pendidikan, Agama, dan Dalam Negeri) untuk menurunkan anemia.
2. Selain itu, susu merupakan opsi lain dari pangan sumber protein. Jadi sebenarnya bisa disubstitusi dengan sumber protein lain, seperti telur, tempe, daging, dll. Seharusnya implementasi MBG mengacu pada [Pedoman Gizi Seimbang](#), bukan 4 Sehat 5 Sempurna yang masih memasukkan susu sebagai elemen penting.

Berdasarkan pemantauan media hingga 17 Januari 2025, terdapat dua kasus keracunan makanan ditemukan pada minggu ke dua pelaksanaan MBG, tepatnya di Sukoharjo³⁰ dan Nunukan Selatan.³¹ Untuk kasus di Nunukan Selatan, penyelesaiannya dilakukan melalui proses yang tidak diketahui, namun akhirnya disimpulkan tidak terjadi keracunan makanan.³²

Keracunan tersebut dapat disebabkan minimnya penerapan prinsip *Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)* dalam program MBG. HACCP merupakan sistem manajemen risiko yang mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko bahaya terkait keamanan pangan di seluruh lini rantai nilai pangan.³² Dari [petunjuk teknis yang tersedia](#), terlihat BGN belum banyak mengatur soal kebersihan dan keamanan pangan, mulai dari penyimpanan, pengolahan, penyaluran, hingga manajemen limbahnya.

² Zat inhibitor zat besi adalah bahan pangan yang tinggi akan kalsium (contoh: susu), tanin (contoh: teh, kopi, coklat), oksalat (teh, coklat), dan polifenol (teh, kopi).

Di sisi lain, struktur SPPG di seluruh daerah hanya diisi oleh satu ahli gizi saja.

Padaahal, pelibatan ahli gizi sangatlah krusial untuk pada semua alur rantai nilai pengolahan pangan di SPPG. Keberadaan ahli gizi tidak hanya sebatas merencanakan dan menyesuaikan menu, namun juga melakukan pemetaan risiko dan pemantauan terhadap standar kebersihan dan keamanan pangan di SPPG. Sebagai gambaran, satu SPPG diekspektasikan memproduksi 3000–3500 porsi makanan per hari.³³ Di sisi lain, kurangnya pemenuhan gizi dari menu yang disajikan dan kejadian keracunan di dua area implementasi MBG menunjukkan perlunya penjaminan kualitas yang lebih baik.

Sebagai gambaran, pelibatan ahli gizi pada program *free school meals* di berbagai negara mencakup perencanaan menu, monitoring pengolahan makanan, melatih juru masak dan petugas lainnya, serta memberikan edukasi tentang makanan dan gizi di sekolah. Di [Jepang](#), sekolah yang menyediakan makan untuk lebih dari 550 siswa harus memiliki setidaknya satu ahli gizi. Sementara itu, dalam penyelenggaraan makan anak sekolah [di Brazil](#), jumlah ahli gizi yang bertugas meningkat 23,7% dalam dua tahun pertama implementasi program.

Rekomendasi

Bila merujuk ketiga persoalan di atas, aspek tata kelola dan kerangka regulasi program MBG merupakan pilar utama yang harus segera dibenahi oleh pemerintah, termasuk di dalamnya proses monitoring evaluasi dan aspek teknis mengenai pemenuhan gizi dan keamanan pangan juga perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Rekomendasi CISDI selengkapnya terangkum pada bagian berikut:

Rekomendasi #1: Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Program MBG

1. Menerbitkan Peraturan Presiden sebagai Payung Regulasi MBG

Pemerintah perlu segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tata kelola MBG secara menyeluruh. Sebagai catatan, pelaksanaan program PMT berada di bawah Perpres 72/2021 mengenai Program Percepatan Pengentasan Stunting yang kemudian diturunkan dalam juknis kementerian/lembaga terlibat. Sementara program PMT Anak Sekolah (PMT-AS) diatur dalam Inpres 1/1997 yang juga diturunkan dengan peraturan setingkat menteri oleh K/L teknis terkait. Desain Perpres tersebut perlu mengatur mekanisme koordinasi lintas sektor, peran pemerintah daerah, mekanisme pemantauan dan evaluasi, serta pengawasan penggunaan anggaran dalam program MBG.

2. Membenahi Tugas Pokok Fungsi dan Koordinasi Lintas Sektor untuk Program MBG

Sentralisasi tata kelola MBG oleh BGN seharusnya tak lagi relevan mengingat keterbatasan kapasitas kelembagaan dan kewenangan BGN. Bila merujuk Perpres 83/2024, tupoksi BGN masih sangat terbatas pada penyaluran makanan terkait pemenuhan gizi nasional. Sementara, untuk mengoptimalkan fungsi lainnya seperti pengawasan, BGN tentu saja memerlukan kolaborasi lintas sektor dengan K/L lain. Bila merujuk praktik baik India, tupoksi lintas sektor diatur dalam kerangka institusi berbasis komite yang turut melibatkan ahli gizi, organisasi masyarakat sipil, perwakilan siswa, dan pakar lintas sektor.

3. Mengembangkan petunjuk teknis yang komprehensif dan terstandar

Badan Gizi Nasional (BGN) harus menyusun petunjuk teknis (juknis) yang detail dan dapat diakses secara terbuka oleh publik untuk mendukung implementasi MBG. Juknis ini perlu mencakup panduan operasionalisasi dapur sentral (SPPG), standar gizi dan pengolahan makanan, sumber dan kualitas pangan, keamanan dan kebersihan pangan, pembatasan pangan ultra-proses dan tidak sehat lainnya, serta mekanisme monitoring dan evaluasi. Juknis tersebut juga harus disertai dengan standar minimum yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dan mitra pelaksana.

4. Program MBG harus diiringi dengan berbagai intervensi gizi sensitif dan spesifik

Program MBG sulit akan berdampak optimal apabila hanya memberikan makanan, tanpa adanya intervensi pada tingkat pengetahuan, perubahan perilaku, juga tantangan akses finansial, sanitasi, dan sosioekonomi lainnya. Untuk itu, program ini tidak dapat berjalan sendirian, dan harus diperkuat dengan berbagai intervensi yang sebenarnya sudah ada dari program stunting maupun program-program Kementerian Kesehatan. Infrastruktur yang sudah tersedia dapat dioptimalkan, dan peran Kemenkes dalam program MBG perlu lebih sentral.

5. Mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, pemerintah perlu mengurangi sentralisasi tata kelola MBG dan membagi kewenangan dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus diberdayakan dalam pengelolaan dapur sentral, pengadaan bahan pangan lokal, dan distribusi makanan dengan asistensi dan supervisi berjenjang yang kuat. Selain itu, BGN perlu memperkuat kapasitas pemerintah daerah melalui pelatihan teknis, pendampingan ahli gizi, dan penyediaan alat bantu teknis yang relevan.

6. Mengatur definisi operasional dan mitigasi konflik kepentingan terkait kemitraan program Makan Bergizi Gratis

Pemerintah perlu mengatur secara jelas definisi operasional, potensi, risiko, mitigasi, dan sanksi konflik kepentingan dalam petunjuk teknis tentang skema kemitraan MBG. Adapun pengaturan tersebut berkaitan dengan amanat upaya pengendalian penyakit tidak menular sebagaimana diatur dalam Pasal 200 Peraturan Pemerintah No. 28/2024 tentang Kesehatan, serta substansi Pengamanan Makanan dan Minuman yang diatur dalam Pasal 146–148 PP 28/2024. Norma, standar, prosedur, dan kriteria ini harus diatur secara jelas, mencakup hak, kewenangan, dan pengawasan yang mengikat semua pihak.

7. Mengeksplorasi pelibatan mitra pembangunan global dalam pengembangan

Pemerintah dapat mengeksplorasi pelibatan mitra pembangunan global, utamanya dalam memberikan asistensi teknis untuk perencanaan, implementasi, dan pengembangan program. Praktik ini sudah dilakukan oleh India dan Brazil pada periode awal pengembangan program *free school lunch*. Pelibatan mitra pembangunan global menjadi penting untuk memetakan basis bukti, mengukur efektivitas, hingga pengembangan, utamanya mitra pembangunan yang sudah memiliki pengalaman teknokratik seperti World Bank, FAO, dan WFP.

Rekomendasi #2: Memperkuat Kualitas Perencanaan serta Membentuk Sistem Pemantauan dan Evaluasi Program MBG Berjenjang

1. Mengukur dampak program MBG dengan variabel kontrol yang jelas dan proses monitoring evaluasi berjenjang

Guna memastikan proses monitoring evaluasi program MBG secara berjenjang, Pemerintah perlu membentuk komite monitoring program yang tersebar dari tingkat nasional, sub-nasional (kabupaten/kota), hingga sekolah. Berkaca dari [praktik baik India](#), komite monitoring ini turut melibatkan peran lintas sektor pada semua tingkatan. Di dalamnya terdapat perwakilan minimal dua organisasi masyarakat sipil, kelompok pakar lintas keilmuan, masyarakat sipil, penyuluh kesehatan, ahli nutrisi, perwakilan sekolah, hingga perwakilan orang tua di luar pemangku kepentingan pemerintah. Berikutnya, pemerintah pusat perlu menentukan indikator proses dan luaran program MBG yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan status gizi. Indikator inilah yang akan menjadi variabel kontrol komite monitoring dalam mengukur dampak sekaligus mengevaluasi program MBG. Basis data yang dikumpulkan akan menjadi masukan untuk pengembangan program di masa mendatang guna

memastikan aspek keberlanjutan, peningkatan signifikansi dampak, dan efektivitas program.

2. Melakukan analisis *cost effectiveness* untuk program MBG

Sebagai bagian dari evaluasi dampak, pemerintah perlu melakukan penghitungan *cost-effectiveness* dengan membandingkan program MBG dengan program gizi pemerintah lainnya untuk melihat program mana yang paling efektif mencapai peningkatan status gizi. Dengan melakukan ini, implementor program dan publik dimungkinkan mendapatkan informasi yang jelas mengenai dampak program, serta memastikan adanya transparansi dan tanggung jawab pemerintah atas penggunaan anggaran publik. Bila pemerintah memiliki keterbatasan melakukan studi ini, maka akademisi, mitra pembangunan dan masyarakat sipil dapat dilibatkan.

3. Membuka forum konsultasi publik yang melibatkan masyarakat dan para ahli untuk penguatan tata kelola program MBG

Pembukaan forum konsultasi publik adalah langkah penting untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, akademisi, dan para ahli, pemerintah dapat menggali kebutuhan dan tantangan selama program MBG berlangsung yang mengedepankan perspektif penerima manfaat. Tidak hanya persoalan teknis di lapangan, melainkan juga mengembangkan desain program MBG. Adapun pelaksanaan konsultasi publik dapat dikoordinasikan oleh BGN selaku koordinator program MBG untuk menangkap masukan yang terkait dengan struktur tata kelola dan operasionalisasi MBG, serta mekanisme koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah.

4. Menyediakan kanal aduan publik untuk program MBG

Mengembangkan kanal aduan publik khusus yang terintegrasi dengan situs website BGN untuk melaporkan temuan di lapangan, seperti pelanggaran prosedur, ketidaksesuaian menu, atau potensi konflik kepentingan. Kanal ini dapat berupa formulir digital maupun nomor darurat (*hotline*) atau aplikasi seluler yang dirancang untuk menerima laporan secara langsung dan cepat. Untuk tindak lanjutnya, perlu ada mekanisme yang mengatur jenis pelaporan yang perlu ditindaklanjuti secara langsung oleh BGN dan jenis pelaporan yang dapat diproses oleh pemerintah daerah. Setiap laporan yang masuk harus dikelola dengan sistem pencatatan yang jelas, mulai dari kategori laporan, tindak lanjut, hingga status penyelesaian guna memastikan transparansi dan meningkatkan kepercayaan publik. Agar efektif, pemerintah kabupaten/kota perlu diberikan akses dan notifikasi dalam akun pelaporan agar dapat memproses aduan publik yang spesifik di wilayah tersebut.

Rekomendasi #3: Memastikan Pemenuhan Gizi dan Keamanan Pangan pada setiap siklus program MBG

1. Memastikan perencanaan menu di setiap dapur sentral/SPPG merujuk kepada panduan gizi seimbang dan melibatkan masyarakat lokal pada setiap prosesnya

BGN dan pemerintah daerah perlu mempertimbangkan penggunaan skema kreasi dalam perencanaan menu MBG melalui komite lintas sektor di level sekolah/kecamatan. Selain partisipatif, skema ini juga memungkinkan desain menu MBG lebih sensitif terhadap kebutuhan gizi di wilayah intervensi, mulai dari persoalan gizi, pola makan, potensi sumber pangan lokal, hingga rantai suplai produk pangan lokal. BGN perlu merujuk pada [pedoman gizi seimbang](#) dari Kementerian Kesehatan sebagai acuan umum perencanaan menu di wilayah intervensi.

2. Menyusun panduan yang komprehensif mengenai standar gizi dan bahan makanan untuk memastikan program memiliki keseragaman standar di seluruh wilayah.

Panduan ini harus mencakup perencanaan menu, standar kebutuhan gizi, serta standar porsi makanan yang disesuaikan dengan kelompok usia. BGN dan pemda dapat mempelajari praktik baik kolaborasi lintas pemangku kepentingan pada PMT lokal Pangandaran yang melibatkan masyarakat secara bermakna dalam setiap siklus programnya.³⁴

3. Penerapan sistem manajemen keamanan pangan berbasis HACCP

Panduan teknis program MBG perlu memasukkan standar di mana setiap SPPG wajib menerapkan sistem *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP). Sistem ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengendalikan potensi bahaya keamanan pangan selama proses produksi makanan. Implementasi HACCP meliputi pengawasan ketat pada titik kritis, seperti pengolahan bahan mentah, penyimpanan, transportasi, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.³²

Tidak hanya menerapkan standar, pemerintah juga perlu memastikan pelatihan, supervisi, dan pengawasan kepada anggota SPPG lainnya untuk menerapkan standar HACCP ini. Semua intervensi ini perlu mencakup prinsip kebersihan personal, teknik pengolahan makanan yang aman, pengendalian risiko kontaminasi, dan tata cara penanganan bahan makanan segar maupun olahan. Penerapan bisa dilakukan secara bertahap hingga mencapai standar ideal HACCP.

Meningkatkan jumlah ahli gizi dalam SPPG juga diperlukan untuk memastikan kualitas operasional SPPG dalam menerapkan standar keamanan pangan. Sebagai perbandingan di [Jepang](#), sekolah yang

menyediakan makan untuk lebih dari 550 siswa harus memiliki satu ahli gizi. Oleh karenanya, perlu dikaji kembali apakah peran dan beban kerja ahli gizi di SPPG sudah tepat dan mampu memastikan tenaga pengolah makanan lainnya mengikuti prosedur yang sesuai.

4. Membatasi penggunaan pangan ultra-proses dalam menu MBG

Pemerintah perlu memastikan adanya petunjuk teknis yang memuat dan dapat membatasi penggunaan pangan ultra-proses dalam program MBG. Ini mencakup pengaturan proporsi anggaran, jenis barang dalam pengadaan, dan cara pengolahannya. Brazil merupakan salah satu negara yang telah mengimplementasikan pendekatan ini. Dalam laporan FULL Global Food Law (2024), disebutkan Brazil membatasi penggunaan daging ultra-proses (sosis, bakso, dsb) serta susu dengan bahan tambahan dan pemanis maksimal 1-2 kali dalam kurun waktu satu bulan.³⁵

Pemerintah Brazil juga melarang pengadaan barang spesifik seperti Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), biskuit, coklat, dan kue kering dalam kemasan masuk ke dalam menu program Makan Gratis di Sekolah. Pemerintah Brazil justru memfokuskan penggunaan anggaran makan gratis (minimal 75% total anggaran) untuk pengadaan produk pangan segar atau makanan yang diproses minimal sesuai [klasifikasi NOVA](#)³ oleh FAO.³⁶ Masuknya susu berperisa dan makanan ultra-proses dalam menu MBG perlu dikendalikan dengan serius oleh Pemerintah. Pada program PMT lokal sebelumnya, keberadaan susu dan makanan ultra-proses bisa ditekan berkat dukungan regulasi, monitoring, dan pelatihan serta edukasi yang menyeluruh pada semua aktor yang terlibat.

Penutup

Program MBG memiliki potensi besar meningkatkan status gizi anak-anak dan mendukung ekonomi lokal. Namun, pemerintah masih perlu melakukan banyak perbaikan untuk membuat program ini berdampak, mulai dari ketersediaan regulasi dan petunjuk teknis, mekanisme pelaporan, monitoring dan evaluasi, pemanfaatan aneka ragam pangan lokal, memastikan standar gizi dan keamanan pangan, menekan penggunaan pangan olahan tinggi GGL, serta menjadikan pendidikan gizi sebagai bagian integral dari program ini. Keterlibatan multipihak dari profesional kesehatan hingga komunitas lokal, juga sangat penting untuk menjamin keberhasilan dan keberlanjutan program.

³ Sistem klasifikasi NOVA mengelompokkan semua makanan berdasarkan sifat, tingkat, dan tujuan dari proses industri yang mereka jalani.

Referensi

1. BBC Indonesia. (2025). *Program Makan Bergizi Gratis resmi dimulai di 100 titik dapur sentral*. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia>
2. Tempo. (2024). *Pemerintah memperluas sasaran penerima manfaat MBG ke ibu hamil dan anak balita*. Retrieved from <https://www.tempo.co>
3. Kompas. (2025). *Target 17,5 juta penerima manfaat: Program MBG akan memiliki lima ribu dapur sentral pada Juli 2025*. Retrieved from <https://www.kompas.com>
4. Suara. (2025). *Menko Pangan: Anggaran MBG Rp 71 triliun hanya cukup hingga Juni 2025*. Retrieved from <https://www.suara.com>
5. Kompas. (2025). *Menteri Koordinator Bidang Pangan: Pemerintah butuh tambahan Rp 100 triliun agar MBG dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat*. Retrieved from <https://money.kompas.com/read/2025/01/17/200323426/makan-bergizi-butuh-tambahan-anggaran-rp-100-triliun-untuk-jangkau-829-juta>
6. Kompas.id. (2025). *Efisiensi anggaran Rp 306,69 triliun terbuka untuk mendanai program MBG*. Retrieved from <https://www.kompas.id/artikel/efisiensi-anggaran-rp-306-triliun-terbuka-untuk-danai-makan-bergizi-gratis>
7. Tempo. (2025). *BPOM baru dilibatkan secara resmi setelah MoU dengan BGN pada 23 Januari 2025*. Retrieved from <https://www.tempo.co>
8. Antara. (2025). *BGN tidak memiliki fungsi pengawasan keamanan pangan sesuai Perpres 83/2024*. Retrieved from <https://www.antaranews.com>
9. Bisnis.com. (2024). *BGN mulai membuka kemitraan untuk MBG pada 31 Desember 2024, tujuh hari sebelum peluncuran program*. Retrieved from <https://www.bisnis.com>
10. Mehrunnisa, T., Thelma, G., & Tiffany, H. (2025). *Laporan Institut Harkat Negeri: Tantangan Implementasi MBG di Daerah dan Ketidadaan Petunjuk Pelaksanaan*. Institut Harkat Negeri.
11. Kontan. (2025). *TNI terlibat dalam Program MBG: 351 Kodim, 14 Lantamal, dan 41 Lanud turut serta*. Retrieved from <https://www.kontan.co.id>
12. Kontan. (2024). *Kemitraan swasta dalam MBG: Distribusi, dapur sentral, dan penyediaan produk pangan*. Retrieved from <https://www.kontan.co.id>
13. Valid News. (2024). *Dinamika peran swasta dalam MBG: Tantangan dan peluang regulasi*. Retrieved from <https://www.validnews.id>
14. DARPG. (2017). *Mid-Day Meal Scheme: Monitoring and Evaluation at Sub-National Levels in India*. Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Government of India. Retrieved from <https://darpg.gov.in/sites/default/files/Mid%20Day%20Meal%20Scheme.pdf>
15. Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology (MEXT). (2023). *School Meals Case Study in Japan: Integration with Shokuiku Policy and Curriculum*. Retrieved from https://schoolmealscoalition.org/sites/default/files/2024-05/MEXT_MAAF_2023_School_Meals_Case_Study_Japan.pdf
16. Law No. 11.947/2009. (2009). *Brazil National School Feeding Program (PNAE): Regulatory Framework for School Meals and Sub-National Government Obligations*. Retrieved from <https://redraes.org/wp-content/uploads/2024/07/Brazil-School-Feeding-Law-PNAE-n-11-947-English.pdf>
17. Kumparan. (2025). *Prabowo menggunakan dana pribadi untuk uji coba MBG, para ahli pertanyakan akuntabilitas kebijakan berbasis bukti*. Retrieved from <https://kumparan.com>
18. World Bank. (2024). *Systematic review of free school meals programs: Evidence from education, agriculture, social protection, and nutrition sectors*. Washington, DC: World Bank.
19. Kompas.com. (2025). *Penerima manfaat MBG ditargetkan mencapai 82,9 juta pada akhir 2025*.
20. Kompas.id. (2025). *Pemerintah keluarkan Inpres 1/2025 untuk efisiensi belanja negara hingga Rp 306 triliun*. Retrieved from <https://www.kompas.id>

21. Kumparan Bisnis. (2025). *Kementerian PU alami pemangkasan anggaran hingga 80%, berpotensi ganggu pembangunan infrastruktur daerah*. Retrieved from <https://www.kumparan.com/kumparanbisnis>
22. Kompas.id. (2025). *Pemerintah daerah diminta anggarkan Rp 2,3 hingga Rp 2,5 triliun untuk program MBG pada 2025*. Retrieved from <https://www.kompas.id>
23. Radar Bromo. (2025). *APBD Probolinggo berkurang Rp 62 miliar akibat kebijakan pemangkasan anggaran untuk MBG*. Retrieved from <https://www.radarbromo.co.id>
24. Investor.id. (2025). *Dana desa Rp 20 triliun dialokasikan untuk mendukung program MBG, dampaknya pada pembangunan daerah*. Retrieved from <https://www.investor.id>
25. Handini, N. (2022). *Pengaruh asupan energi terhadap performa akademik siswa sekolah dasar*. Jurnal Gizi dan Kesehatan, 14(2), 45-57.
26. Fendy, S. (2015). *Dampak kelebihan konsumsi protein terhadap risiko obesitas pada anak sekolah dasar*. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 10(1), 98-105.
27. Poh, B. K., et al. (2013). *Nutritional status and dietary intake among school children in Malaysia*. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, 21(1), 151-160. Retrieved from <https://apjcn.nhri.org.tw/server/apjcn/21/1/151.pdf>
28. PAHO. (2015). *Ultra-processed food and drink products in Latin America: Trends, impact on obesity, policy implications*. Pan American Health Organization (PAHO).
29. Global Food Research Program. (2023). *The impact of ultra-processed foods on diet quality and health outcomes*. University of North Carolina at Chapel Hill. Retrieved from <https://www.globalfoodresearchprogram.org>
30. Tempo. (2025). *Kasus keracunan makanan di Sukoharjo dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG)*.
31. Pena Kaltara. (2025). *Keracunan makanan di Nunukan Selatan: Evaluasi dan hasil penyelidikan program MBG*.
32. Kompas.com. (2025). *Kasus keracunan makanan dalam MBG: Pemerintah menyatakan tidak terjadi keracunan*.
33. FDA. (2022). *Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP): A management system in food safety*. U.S. Food and Drug Administration.
34. Elshinta. (2025). *Kapasitas produksi SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis: Tantangan dan kebutuhan ahli gizi*.
35. CISDI. (2023). *Praktik baik PMT lokal Pangandaran: Kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam intervensi gizi berbasis masyarakat*. Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives.
36. Food Law. (2020). *Resolution No. 6 of May 8, 2020*. Retrieved from <https://dev-foodlaw.pantheonsite.io/documents/resolution-no-6-of-may-8-2020/>
37. FAO. (2024). *Ultra-processed foods, diet quality, and health: Using NOVA classification*. Food and Agriculture Organization. Retrieved from <https://www.fao.org/fsnforum/>
38. Japan Society of Nutrition and Food Science. (2024). *School meal program in Japan: A case study*. J-STAGE. Retrieved from https://www.jstage.jst.go.jp/article/eiyogakuzashi/76/Supplement/76_S115/_pdf
39. Government of Brazil. (2024). *Brazil School Feeding Law PNAE No. 11.947*. REDRAES. Retrieved from <https://redraes.org/wp-content/uploads/2024/07/Brazil-School-Feeding-Law-PNAE-n-11.947-English.pdf>
40. Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) & Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAAF). (2023). *School Meals in Japan: A Case Study*. School Meals Coalition. Retrieved from <https://schoolmealscoalition.org/sites>
41. Antara News. (2025). *Pelaksanaan MBG hari pertama di Kudus berjalan lancar*. Retrieved from <https://jateng.antaranews.com/berita/566810/pelaksanaan-mbg-hari-pertama-di-kudus-berjalan-lancar>

42. Ardianysah, F. (2025). *Susu UHT di menu makan bergizi gratis disorot, bisa bikin obesitas*. IDN Times. Retrieved from <https://jatim.idntimes.com/>
43. Kompas. (2025). *Senyum ceria siswa karena ada ayam pada menu makan bergizi di Palembang*. Retrieved from <https://www.kompas.id/artikel/senyum-ceria-siswa-palembang>
44. CNN Indonesia. (2025). *SD dan PAUD di Jaktim dapat susu di hari keempat makan bergizi gratis*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/>
45. Kumparan. (2025). *Menu makan bergizi gratis hari kedua di Sleman tanpa susu dan ayam*. Retrieved from <https://kumparan.com/pandangan-jogja/menu-makan-bergizi-gratis-hari-kedua-di-sleman-tanpa-susu-dan-ayam-24lkKAXgFYj/1>
46. RRI. (2025). *Siswa SD 067246 Medan dapat makan sehat bergizi*. Retrieved from <https://www.rri.co.id/makan-bergizi-gratis/1238905/siswa-sd-067246-medan-dapat-makan-sehat-bergizi>
47. RCTI Plus. (2025). *Perdana makan bergizi gratis di Kota Cirebon digelar di SDN Karya Mulya I*. Retrieved from <https://www.rctiplus.com/news/detail/terkini/4655626/perdana-makan-bergizi-gratis-di-kota-cirebon-digelar-di-sdn-karya-mulya-1>
48. Kompas. (2025). *Puluhan anak SD di Nunukan keracunan MBG, begini penjelasan penyedia menu*. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2025/01/17/133943478/puluhan-anak-sd-di-nunukan-keracunan-mbg-begini-penjelasan-penyedia-menu>
49. Kompas. (2025). *Dapat ayam teriyaki dalam menu makan bergizi gratis, siswa di Bogor. Aku senang!*. Retrieved from <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/01/13/15113931/>
50. Tribun Jateng. (2025). *Program MBG di Batang terapkan menu sehat dan variatif untuk siswa*. Retrieved from <https://jateng.tribunnews.com/2025/01/14/>
51. Pikiran Rakyat. (2025). *Program makan bergizi gratis di Sleman mulai bergulir, sasar 35 sekolah*. Retrieved from <https://portaljogja.pikiran-rakyat.com/yogyaistimewa/>
52. CNN Indonesia. (2025). *Media asing soroti murid SD Sukoharjo keracunan makan bergizi gratis*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20250118164720-106-1188695/>
53. Kompas. (2025). *Kepala komunikasi presiden Hasan Nasbi tinjau makan bergizi gratis di Yogyakarta*. Retrieved from <https://yogyakarta.kompas.com/read/2025/01/17/110829978/>
54. Detik. (2025). *Menu makan bergizi di Kota Bandung: Ayam goreng hingga burger*. Retrieved from <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7719053/>
55. Bisnis Sumatra. (2025). *Makan bergizi gratis di Palembang mulai berjalan, ada 5 sekolah hari ini*. Retrieved from <https://sumatra.bisnis.com/read/20250106/533/1829256/>

Lampiran 1. Analisis studi kasus komparatif program makan anak sekolah Indonesia, India, Jepang, dan Brazil

Negara	Pemangku Kepentingan	Mekanisme Tata Kelola	Skema Perlindungan Sosial	Regulasi	Skema Penyaluran	Sumber Pendanaan
Indonesia	Badan Gizi Nasional	• Pengelolaan: Dikelola secara terpusat oleh Badan Gizi Nasional (BGN). • Pelaksanaan: Diimplementasikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di bawah BGN melalui skema dapur sentral. • Kerja Sama Internasional: Belum ada MoU resmi antara WFP dan Pemerintah Indonesia terkait dukungan teknis dalam perencanaan dan implementasi MBG.	<i>In Kind Transfer</i>	Belum tersedia	Sentralistik: Produk pangan dikumpulkan dan diolah oleh sistem dapur terpusat (SPPG) yang berada di bawah koordinasi langsung BGN	Pemerintah Pusat melalui skema APBN melingkupi belanja kementerian dan dana transfer daerah
Brazil	Kementerian Pendidikan FNDE (Agensi sektor Pendidikan di tingkat Federal)	• Pengelolaan: Pemerintah federal memiliki peran sentral dalam perencanaan, pembiayaan, dan monitoring evaluasi program. • Pelaksanaan: Diimplementasikan oleh	<i>In Kind Transfer</i>	1. 1988 Brazilian Federal Constitution 2. Law no 11.947/2009	Desentralistik: Produk bahan makanan segar dikumpulkan dan diproses langsung oleh sekolah dengan melibatkan siswa menjadi 'hot meals'	Pemerintah Federal



Negara	Pemangku Kepentingan	Mekanisme Tata Kelola	Skema Perlindungan Sosial	Regulasi	Skema Penyaluran	Sumber Pendanaan
	World Food Programme (WFP)	<i>National Fund for Educational Development</i> (FNDE) di tingkat pemerintah federal yang berkoordinasi langsung dengan Kementerian Pendidikan. Kerja Sama Internasional: WFP terlibat dalam pendampingan teknis dan peningkatan kapasitas implementasi program.				
India	Kementerian Pendidikan	Pengelolaan: Negara bagian memiliki peran sentral dalam perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengembangan program. Pelaksanaan: Implementasi program di negara bagian dikelola oleh District Level Committee yang terdiri dari perwakilan parlemen, dinas pendidikan, dinas sanitasi, serta perwakilan masyarakat sipil. Kerja Sama Internasional:	<i>In Kind Transfer</i>	2001 Supreme Court order (Right to food)	Desentralistik: Bahan makanan segar dikumpulkan dan diproses langsung oleh sekolah dengan melibatkan siswa menjadi <i>'hot meals'</i> Sentralistik: Bahan makanan diolah terlebih dahulu di dapur sentral sebelum didistribusikan pada anak	Kontribusi pemerintah pusat (60%) dan pemerintah negara bagian (40%)
	Pemerintah negara bagian					
	World Food Programme (WFP)					
	Food Agricultural Organisation (FAO)					



Negara	Pemangku Kepentingan	Mekanisme Tata Kelola	Skema Perlindungan Sosial	Regulasi	Skema Penyaluran	Sumber Pendanaan
		WFP dan FAO memberikan asistensi teknis pada periode awal program, sebelum dikelola mandiri oleh pemerintah negara bagian.				
Jepang	Kementerian Pendidikan	• Pengelolaan: Pemerintah prefektur dan munisipal memiliki peran utama dalam perencanaan, implementasi, dan monitoring evaluasi.	<i>In Kind Transfer</i>	1. 1954 School Lunch Program ACT 2. 2005 Shokuiku ACT	Desentralistik: Produk bahan makanan segar dikumpulkan dan diproses langsung oleh sekolah dengan melibatkan siswa menjadi 'hot meals'	Kontribusi iuran dari orang tua dengan subsidi oleh Pemerintah Pusat
	Pemerintah Prefektur	• Pelaksanaan: Biro Kepemudaan dan Olahraga mengorkestrasi program <i>free school meals</i> dengan sekolah sebagai implementor program. Ini didukung dengan masuknya program ke dalam kurikulum sebagai bagian dari upaya peningkatan edukasi/literasi gizi di sekolah (<i>Shoukaku</i>). • Kerja Sama Internasional: Tidak ada pelibatan mitra pembangunan global dalam pelaksanaan program ini.				

Lampiran 2 Menu MBG di beberapa lokasi Implementasi (periode 6–17 Januari 2025)

No	Lokasi Uji Coba	Menu	Jenjang	Energi (Kal)*	Kontribusi terhadap AKG Energi Harian (%)**	Protein (gr)*	Kontribusi terhadap AKG Protein Harian (%)***
1	Kudus	Nasi, sayur, tahu goreng, ayam, potongan buah semangka, dan susu kemasan berperisa	PAUD	488.84	36	22.73	114
2	Sidoarjo	Nasi putih, ayam tepung, tumis sawi tahu, semangka, dan susu kemasan berperisa	SD	634.19	33	24.17	46
3	Palembang	Nasi putih, ayam saus asam manis, tahu goreng, sayur capcay, dan semangka	SD	566.2	29	23.31	44
4		Nasi putih, telur kari, tempe orek, sayur kacang panjang, dan pisang	SD	553.82	28	18.1	34
5	Jakarta Timur	Nasi putih, telur rebus, tumis wortel, dan susu kemasan berperisa	SD	466.06	24	16.68	32
6	Sleman	Nasi, telur dadar, oseng tempe, tumis kacang panjang wortel, melon, dan semangka potong	SD	562.7	29	18.34	35
7	Medan	Nasi, ayam goreng, tempe goreng, sayur kacang dan wortel, melon, dan saus sambal	SD	664.68	34	25.74	13
8	Cirebon	Nasi, jeruk, ayam, tahu, dan sayuran	SD	655.56	34	24.31	46
9	Kalimantan Utara	Nasi putih, Ayam kecap, sayur buncis	SD	434.73	22	17.46	33



10	Bogor	Nasi putih, sayur capcay, chicken teriyaki, satu buah jeruk, serta satu cup puding susu.	SD	501.68	26	19.22	37
11	Batang	Nasi Putih, Telur sambal, ikan asin, jeruk, sayur capcay	SD	479.41	25	17.03	32
12	Sleman	Nasi, ayam goreng, tahu goreng, oseng kacang panjang, pisang, dan susu	SD	598.97	31	22.49	43
13	Sukoharjo	Nasi putih, ayam goreng tepung, ca wortel, tahu goreng, potongan buah naga, dan susu kemasan berperisa	SD	667.13	34	25.11	48
14	Sleman	Nasi, ayam, sayur, tahu goreng, dan susu kemasan berperisa	SD	726.16	37	27.59	53
15		Chicken crispy saus cream cheese, mix vegetable, semangka, nasi putih, susu kemasan berperisa	SMP	609.09	27	23.83	35
16		Fish crispy vegetable saus asam manis, mie goreng, pisang, nasi putih	SMP	580.98	26	18.21	27
17		Burger chicken saus bbq, pokcoy saus garlic oil, pepaya, nasi putih	SMP	495.78	22	15.93	24
18		Chicken katsu saus thousand island, soun with vegetable sauce, melon, nasi putih	SMP	547.7	25	17.22	26
19		Korean egg roll saus bistik, tempe goreng tepung, pisang, nasi putih, susu kemasan berperisa	SMP	620.4	28	26.58	39

20	Palembang	Nasi putih, nugget ikan, sambal tempe, tumis buncis, dan pisang	SMP	513.77	23	20.91	31
21	Jakarta dan Depok	Nasi, ayam teriyaki	SMP	409	18	17.5	26
22	Banjarmasin	Bihun, sayur, pisang, dan susu kemasan berperisa	SMP	514.44	23	9.8	15
23	Surabaya	Nasi, ayam kecap, sayur buncis, wortel dan tahu, semangka, susu kemasan berperisa	SMP	558.9	25	24.34	36
24	Bali	Nasi putih, ayam goreng, tahu, tumis kol putih dan wortel, dan susu kemasan berperisa	SMA	615.95	26	31.88	46
25	Sukabumi	Nasi putih, ayam semur, sayur tahu, dan susu kemasan berperisa	SMA	583.14	25	28.47	41
26	Garut	Nasi putih, ayam tepung, tahu goreng, wortel, pisang	SMA	690.62	29	25.58	37
27	Batang	Nasi, telur, sayur, susu kemasan berperisa, dan jeruk	SMA	598.37	25	29.05	42
28		Nasi, ayam, sayur, dan pisang	SMA	438.87	18	17.06	24
29		Nasi, ikan asin, capcay, dan buah salak	SMA	404.59	17	10.62	48

*Perhitungan energi dan protein dalam tabel merupakan estimasi tanpa penimbangan berat bahan makanan yang dipakai dan tidak memperhitungkan penggunaan bumbu dan bahan tambahan lain yang digunakan ketika proses pengolahan. Estimasi menu yang disajikan adalah dua satuan penukar (dalam berat gram) untuk sumber karbohidrat bagi jenjang SD, SMP, dan SMA, satu satuan penukar sumber karbohidrat bagi jenjang KB, dan satu satuan penukar (dalam berat gram) untuk protein dan sayur untuk semua jenjang

**Perhitungan kontribusi terhadap Angka Kecukupan Gizi (AKG) energi dihitung menggunakan total konsumsi energi per AKG energi harian dikali 100%

***Perhitungan kontribusi terhadap AKG protein dihitung menggunakan total konsumsi protein per AKG protein harian dikali 100%